

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pemerintah terus melakukan dan pembaharuan dan pembangunan di segala sektor khususnya ekonomi. Tuntutan masyarakat sangat kritis menuntut pemerintah untuk memperbaiki dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan mementingkan kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan yang di buat pemerintah merupakan upaya untuk melanjutkan dan memelihara fasilitas umum yang ada agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu penunjang adanya fasilitas umum yang ada adalah dengan meningkatkan pembangunan nasional.

Untuk dapat melakukan pembangunan nasional yang merata di seluruh pelosok nusantara di perlukan dana yang cukup besar agar pelaksanaan pembanguna dan perbaikan berjalan dengan baik serta memuaskan masyarakat.usaha untuk mendapatkan dana tersebut harus dilakukan secara terus menerus dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber dana yang ada.

Sebagian besar penerimaan kas negara merupakan pendapatan yang berasal dari daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai sektor pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya. Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas di berbagai daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Dimana pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pungutan pajak lebih menguntungkan pemerintah, karena pajak mempunyai unsur paksaan yang bersifat yuridis dan ekonomis, tidak menuntut balas jasa langsung. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah / desentralisasi menjadikan kekuasaan daerah terletak pada kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya, termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut (APBD). Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan semua sector pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikkan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya..

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan

meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah salah satunya adalah dari pajak parkir. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan.

Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah

memerlukan tempat untuk menipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak parkir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis akan membahas kontribusi yang telah diberikan oleh tindak penagihan pajak optimalisasi penerimaan pajak, serta hambatan yang mungkin timbul dalam praktik penagihan pajak tersebut. Atas dasar uraian tersebut diatas maka penulis akan member judul pada penulisan ini adalah **“Sistem Penerimaan Kas Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKAD) Daerah Kabupaten Tanah Datar“**.

1.2. Perumusan Masalah

Penerimaan pendapatan dari pajak parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar membantu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini keefektifan sistem penerimaan kas dari aktivitas penerimaan tersebut sangat perlu di perhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian sistem penerimaan kas pajak parkir yang dilaksanakan DPPKAD kabupaten TANAH DATAR ?
2. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem penerimaan kas tersebut.

1.3. Tujuan Kegiatan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan magang terbagi dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga peserta memiliki persepsi, wawasan dan motivasi tinggi terhadap perannya di masa depan.
- c. Menyaksikan langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam praktek di lapangan.
- d. Terlatih untuk bersosialisasi dengan rekan kerja dalam lingkungan yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- e. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapat dari perkuliahan kelampahan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- f. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus, berisi penjabaran tentang hal yg akan dicapai untuk memenuhi/mencapai tujuan umum, yaitu merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian.

1.4. Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berlangsung selama 40 hari kerja atau lebih kurang dua bulan kalender, dengan jam kerja menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, rencana waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II : Landasan Teori ,terkait tentang pengertian pajak, jenis - jenis pajak, pengertian pajak bumi dan bangunan, objek pajak, subjek pajak parkir, dasar dan tarif pajak parkir.

Bab III : Gambaran Umum Kantor dan Kabupaten Tanah Datar geografi dan demografi Kabupaten Tanah Datar, lambang daerah dan artinya, motto kabupaten Tanah Datar, visi dan misi instansi terkait, struktur organisasi instansi terkait, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam DPPKAD Kabupaten Tanah Datar.

Bab IV: Pembahasan Menguraikan tentang Proses penerimaan kas pajak parkir kabupaten Tanah Datar.

Bab V : Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang sifanya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.

